

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dapat terselesaikan. Setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun LAKIP dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat terbangunnya organisasi yang tepat fungsi, efektif, efisien dan secara profesional dapat memberikan pelayanan prima.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini sebagai upaya penyempurnaan atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan, penanganan dan antisipasi terhadap persoalan yang berkaitan dengan dinamika sosial politik, ideologi negara, wawasan kebangsaan,

kewaspadaan masyarakat dan ketahanan bangsa guna terciptanya situasi daerah yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah.

Semoga dalam penyusunan LAKIP dari Badan Kesbang pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah ini dapat memberikan inspirasi dan gambaran yang jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban secara transparan dan akuntabel kepada pihak-pihak yang terkait maupun kepada publik, sehingga dapat diketahui kinerja dan upaya dalam mewujudkan *Good Governance* menuju pelayanan yang prima.

Sebagai salah satu unsur pemerintahan di daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, senantiasa berupaya untuk mengantisipasi segala permasalahan agar tidak terjadi gejolak atau melakukan perbuatan yang anarkhis guna mendukung keamanan dan kenyamanan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang dapat disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah

Semarang, Maret 2014

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591202 198203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi.....	3
E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras	4

BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013	13
C. Penetapan Kinerja (PK) TAHUN 2013.....	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	23
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja	29
C. Akuntabilitas Keuangan	46

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan	51
B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	52
C. Strategi Pemecahan Masalah	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stabilitas keamanan daerah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 secara umum dapat dikatakan kondusif termasuk juga penyelenggaraan Pilgub 2013 walaupun persentase pemilih turun dari tahun sebelumnya serta sempat diwarnai dengan terjadinya konflik sosial, konflik berbau SARA dan konflik antar warga, namun tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan maupun pemerintahan.

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri merupakan upaya memberdayakan masyarakat Jawa Tengah sehingga memungkinkan untuk memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat dan martabatnya. Kualitas kehidupan tersebut diatas merupakan hak setiap masyarakat Jawa Tengah, tetapi dalam usaha untuk mewujudkannya diperlukan kerja sama yang baik dan dinamis dari semua elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas dari lingkungan terkecil sampai dengan lingkungan yang terbesar.

Guna mewujudkan harapan *stakeholder* maupun masyarakat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2013 dengan berpedoman pada (Renstra) Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang di dalamnya memuat visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. **Rp. 61.383.130.000 (enam puluh satu milyar tiga ratus delapan**

puluh tiga seratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut di jabarkan sebagai berikut :

1. **Belanja Langsung**, sebesar Rp. 50.712.389.000 (lima puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
2. **Belanja Tidak Langsung**, sebesar Rp. 10.671.337.000 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Perda Provinsi Jawa Tengah No.7 Tahun 2008 dan Pergub Jawa Tengah No.85 Tahun 2008 mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Badan Kesbang Pol dan Linmas adalah merupakan institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat. Keberadaan SKPD di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, adanya upaya pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, maupun pengelolaan penanganan Kamtibmas yang menjamin terlindunginya sendi kehidupan masyarakat dari ancaman dan konflik.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada public atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

a. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Tengah, pada bagian ketiga paragraf 2 pasal 22 disebutkan bahwa Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Program.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan :
 - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
4. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :
 - a. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Masyarakat.
 - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - a. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik.
 - b. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat.;
 - b. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Di samping struktur organisasi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya aparatur yang mendukung dalam terselenggaranya seluruh program dan kegiatan dari Januari - Desember 2013 sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 120 orang, dengan komposisi :
 - a. PNS sebanyak 106 orang.

- b. Pegawai Honorer sebanyak 2 orang.
 - c. Harlep/tenaga kontrak sebanyak 12 Orang
2. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 17 orang, terdiri dari :
- a. Kepala Badan : 1 orang
 - b. Sekretaris : 1 orang
 - c. Kepala Bidang : 4 orang
 - d. Kepala Subbagian : 3 orang
 - e. Kepala Subbidang : 8 orang
3. Jumlah PNS berdasarkan golongan
- a. Golongan IV : 11 orang
 - b. Golongan III : 81 orang
 - c. Golongan II : 21 orang
 - d. Golongan I : 0 orang
4. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan
- a. S D : - orang
 - b. S L T P : 7 orang
 - c. S L T A : 33 orang
 - d. Diploma/Sarmud : 3 orang
 - e. Sarjana/S 1 : 47 orang
 - f. Pasca Sarjana/S 2 : 16 orang

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat

Pada tahun 2013 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2008-2013, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada pencapaian sasaran utama yaitu:

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang bersatu, ber-Pancasila dan berkeadilan sosial.
- b. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan hukum dan HAM
- c. Meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan masyarakat Jawa Tengah
- d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan kenyamanan lingkungan dari gangguan kamtibmas serta pencegahan tindakan kriminal dan terorisme
- e. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat Jawa Tengah untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif dan menjang kehidupan yang demokratis
- f. Meningkatkan upaya pencapaian kondusifitas daerah
- g. Mewujudkan komitmen "Bali Ndeso Bangun Deso" Gubernur Jawa Tengah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2013 dalam rangka mendukung Visi Badan

Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu **"Menjadi Penggerak Menuju Dinamika Masyarakat Jawa Tengah Yang Demokratis "**.

Pencapaian sasaran strategis dalam upaya mewujudkan Visi yang di maksud maka pada tahun 2013 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 12 program dan 97 kegiatan.

A. Rencana Strategik

Rencana strategik pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat secara spesifik memuat tentang hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul. Visi, misi, indikator kinerja, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan disusun dalam rencana strategik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang bersifat indikatif dalam rangka melaksanakan komitmen Gubernur **"Bali Ndeso Bangun Deso"** dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif, demokratis, dan terlindunginya masyarakat Jawa Tengah dari gangguan kamtibmas, terorisme dan potensi konflik.

Pada pertengahan tahun 2013, telah di laksanakan serah-terima jabatan Gubernur dan dilaksanakan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RENSTRA Badan Kesbang Pol dan Linmas Tahun 2013-2018. Selama masa transisi tersebut kegiatan tetap mengacu pada RPJMD dan RENTRA tahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan rencana strategik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat perlu dirumuskan tujuan akhir dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan Visi dan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Visi

Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah : **"Menjadi Penggerak Menuju Dinamika Masyarakat Jawa Tengah Yang Demokratis "**

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi, ditentukan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

- a. Memfasilitasi terwujudnya dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka dan dewasa melalui partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menumbuhkembangkan kemandirian dan dinamika partai politik, organisasi kemasyarakatan/LSM dan lembaga pemerintah.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semangat persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air serta mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjadi identitas watak dan alat pemersatu bangsa.
- d. Mendorong dan menumbuhkembangkan terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta terlindunginya dari potensi konflik

c. Tujuan

Guna melaksanakan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan yang akan di capai oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a. Mewujudkan dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka dan dewasa melalui partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Meningkatkan kemandirian dan dinamika partai politik, ormas/LSM dan lembaga pemerintah
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semangat persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air serta mewujudkan Pancasila
- d. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib seta terlindungi dari potensi konflik

d. Sasaran

Untuk mendapatkan hasil yang terukur, spesifik, dan rasional dari tujuan maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

- a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan indikator sebagai berikut :
 1. Persentase peningkatan kondusifitas daerah
 2. Persentase penurunan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa
 3. Jumlah pelaporan data harian situasi daerah
 4. Jumlah kejadian menonjol
 5. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM, KOMINDA, FPBI dan FKUB
 6. Jumlah masyarakat sipil yang memiliki kemampuan penyelesaian konflik
- b. Meningkatnya pemahaman ideologi Negara bagi aparatur pemerintah dan elemen masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah peningkatan anggota masyarakat yang paham ideologi Negara
 2. Jumlah aparatur dan elemen masyarakat yang memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila
 3. Jumlah peningkatan kalangan pendidikan (pendidik dan siswa/mahasiswa) yang memahami dan mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- c. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara, dengan indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami konsep berbangsa dan bernegara.
 2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen terhadap bela negara
- d. Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan, dengan indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah mahasiswa dan ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah

2. Jumlah Toga, Toma, dan generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan
 3. Jumlah Toma, Toga dan tokoh penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa
- e. Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat secara optimal, dengan indikator sebagai berikut :
1. Jumlah peningkatan ormas yang dinamis dan mandiri
 2. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dengan negara
 3. Jumlah ormas dan LSM aktif
 4. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/ormas dan OKP
- f. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam pembangunan bidang politik, dengan indikator sebagai berikut :
1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik
 2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik
 3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik
 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik
 5. Jumlah peningkatan elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya
 6. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah
 7. Jumlah aparatur profesional yang menangani pilkada di Jateng
 8. Persentase peningkatan pemilih dalam pilkada Jateng
 9. Persentase pilkada aman dan demokratis
 10. Persentase peningkatan indeks demokrasi Indonesia di Jateng
 11. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada
- g. Meningkatnya kesejahteraan anggota Linmas, dengan indikator sebagai berikut :
1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka
 2. Jumlah anggota linmas yang mendapatkan tali asih

3. Jumlah anggota linmas yang mendapatkan modal usaha
- h. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan lingkungan, dengan indikator sebagai berikut :
1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dalam mengamankan lingkungan
 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil
 3. Jumlah anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air
 4. Jumlah peningkatan anggota Menwa Mahadipa yang meningkat kapasitasnya
- i. Meningkatnya stabilitas keamanan Jateng dalam Pilgub 2013, dengan indikator sebagai berikut :
1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan PAM Pilgub 2013
 2. Jumlah anggota Satlinmas yang di tingkatkan kemampuan dan kesiapannya dalam PAM Pilgub
 3. Jumlah PAM swakarsa yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengamanan lingkungan
- j. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Hansip/Linmas, dengan indikator sebagai berikut :
1. Jumlah personil dalam pendidikan kemasyarakatan Hansip/Linmas

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Dalam RKT tahun 2013 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis, indikator dan target yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Data harian situasi daerah 2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP 3. Persentase kejadian menonjol 4. Persentase kondusifitas wilayah 5. Jumlah orang asing 6. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat 7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat 8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi 9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik 11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat	365 hari 20 kali 100% 100% 11.000 Orang 10% 70 kali 70 Orang 15 kali 150 Orang 100%

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara 2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila 3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila 4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila	360 Orang 70 Orang 150 Orang 150 Orang
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela Negara	1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami Ideologi Negara, berbangsa dan bernegara 2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara	210 Orang 210 Orang
Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan	1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah 2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa	280 Orang 120 Orang 130 Orang
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal	1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan 2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan dinamis 3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn	120 Orang 120 Orang 240 Orang

	Negara 4. Jumlah Ormas Aktif 5. Jumlah LSM 6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP	400 390 10 kali
Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam pembangunan bidang Politik	1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik 2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik 3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik 5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat	250 orang 250 Orang 250 Orang 200 Orang 150 orang
	6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah	250 orang 35 Kab/Kota
	8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng 9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng 10. Jumlah orpol 11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng 13. Persentase Pilkada aman dan demokratis 14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada	200 Orang 75% 38 35 kali 80% 100% 20 kali
Meningkatnya Kesejahteraan anggota Linmas	1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih 3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha	317 Orang 350 Orang 175 Orang
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan Lingkungan	1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air	875 Orang 110 Orang 110 Orang
	4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas	35 Kab/Kota 360 Orang
Meningkatnya Stabilitas Keamanan Keamanan Jateng Dalam Pilgub 2013	1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan PAM Pilgub 2. Jumlah Anggota Linmas yang di tingkatkan kemampuan- Dan kesiapannya dalam PAM Pilgub 3. Jumlah PAM Swakarsa yang ditingkatkan kemampuannya Dalam pengamanan lingkungan	35 Kab/Kota 6.375 Orang 50 Orang
Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Anggota Hansip/Linmas	Jumlah personil dalam dikmas Hansip/Linmas	1100 Orang
	potensi politiknya	

C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 yang telah di sepakati antara Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Data harian situasi daerah	365 hari	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas 2. Kominda 3. FGD Analisa Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan 4. Pengawasan Orang Asing 5. Koordinasi Pengamanan Wilayah 6. Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah 7. Pembinaan Sosial Politik 8. Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian 9. Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah 10. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan 11. Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik 12. Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi 13. Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi	5.530.000.000
	2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP	100 kali		1.100.000.000
	3. Persentase kejadian menonjol	100%		300.000.000
	4. Persentase kondusifitas wilayah	100%		300.000.000
	5. Jumlah orang asing	11.000 Orang		200.000.000
	6. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat	15%		350.000.000
	7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat	50 kali		150.000.000
	8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi	70 Orang		540.000.000
	9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM	26 kali		300.000.000
	10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik	100 Orang		300.000.000
	11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat	100%		300.000.000
			200.000.000	
			390.000.000	
			200.000.000	

			Kesejahteraan Rakyat	
			14. Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan	200.000.000
			15. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	150.000.000
			16. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal	150.000.000
			17. Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan	200.000.000
			18. Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	200.000.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.545.000.000
			1. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM	300.000.000
			2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	250.000.000
			3. Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	2.995.000.000

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara	100 Orang	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara 2. Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara 3. Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Validitasi Data Perkembangan Faham Lain 4. Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat dalam Kerangka Peningkatan Wasbang 5. Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah	2.400.000.000
	2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila	30 Orang		300.000.000
	3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila	200 Orang		275.000.000
	4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila	150 Orang		300.000.000
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara	1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami berbangsa dan bernegara	200 Orang	6. Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan 7. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat	250.000.000
	2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd	200 Orang		250.000.000
Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan	bela negara		serta akulturasi Budaya	
	1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah	280 Orang	8. Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan 9. Fasilitasi Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik	250.000.000 250.000.000
	2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan	120 Orang	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah	975.000.000 150.000.000
	3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat	130 Orang	2. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur	250.000.000

	kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan		dan Elemen Masyarakat	
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal	dan harmonisasi komponen bangsa		3. Pendayagunaan Potensi Ormas	250.000.000
	1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan	120 Orang	4. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara	200.000.000
	2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan Dinamis	120 Orang	5. Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar	125.000.000
	3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara	240 Orang	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	2.125.000.000
	4. Jumlah Ormas Aktif	400	1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga	300.000.000
	5. Jumlah LSM	390	2. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah	300.000.000
Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masy dalam pembangunan bidang politik	6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP	10 kali	3. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol	250.000.000
	1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik	250 orang	4. Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	200.000.000
	2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik	250 Orang	5. Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada	150.000.000
	3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik	250 Orang	6. FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat	200.000.000
pembangunan bidang politik	4. Jumlah anggota parpol yang memahami	200 Orang	7. Peningkatan Penanganan Dampak Poltik Pilkada	125.000.000
			8. Pemantauan dan Pendataan Parpol Daerah	150.000.000
			9. Pendidikan Politik Masyarakat	200.000.000
			10. Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	150.000.000
	5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya	150 orang	11. Pendidikan Politik Bagi Perempuan	100.000.000

	<p>6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik</p> <p>7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah</p> <p>8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng</p> <p>9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng</p> <p>10. Jumlah orpol</p> <p>11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah</p> <p>12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng</p> <p>13. Persentase Pilkada aman dan demokratis</p> <p>14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada</p>	<p>250 orang</p> <p>35 Kab/Kota</p> <p>200 Orang</p> <p>75%</p> <p>38</p> <p>35 kali</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>20 kali</p>		
Meningkatnya Kesejahteraan anggota Linmas	<p>1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka</p> <p>2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih</p> <p>3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha</p>	<p>169 Orang</p> <p>210 Orang</p> <p>175 Orang</p>	<p>Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih)</p> <p>1. Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jateng</p> <p>2. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng</p> <p>3. Peningkatan Keterampilan PAM lingkungan bagi Komandan Satlinmas</p>	<p>26.953.160.000</p> <p>900.000.000</p> <p>300.000.000</p> <p>200.000.000</p>

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan lingkungan	1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan	875 Orang	4. Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air	200.000.000
	2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil	110 Orang	5. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas	150.000.000
	3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air	110 Orang	6. Fasilitas Menwa Mahadipa	80.000.000
			7. Pembinaan dan Pendampingan Fasilitas Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jateng	300.000.000
Meningkatnya stabilitas keamanan Jateng dalam Pilgub 2013	4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas	35 Kab/Kota	8. Dukungan Fasilitas PAM Pilgub 2013	1.626.640.000
	5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas	360 Orang	9. Orientasi Kesiapan dan Dukungan Fasilitas PAM Pilgub Tahun 2013 bagi Satlinmas	23.071.520.000
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Hansip/Linmas	1. Jumlah monitoring dan fasilitas dukungan PAM Pilgub 2013	35 Kab/Kota	10. Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa	125.000.000
	2. Jumlah anggota Satlinmas yang ditingkatkan kemampuan dan kesiapannya dalam PAM Pilgub 2013	6.375 orang		
	3. Jumlah PAM swakarsa yang ditingkatkan kemampuan dalam pengamanan lingkungan	50 Orang		
	Jumlah personil dalam dikmas Hansip/Linmas	1100 Orang		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013 ada 3(tiga) aspek yang akan di bahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Kinerja
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran di gunakan interval nilai sebagai berikut :

- | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1. | > 100 | : Amat Baik |
| 2. | 80 – 99 | : Baik |
| 3. | 50 – 79 | : Cukup |
| 4. | > 49 | : Kurang |

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Sampai dengan Bulan Desember 2013, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan

dengan baik dan lancar. Seluruh capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka dan dewasa melalui partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Data harian situasi daerah 2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP 3. Persentase kejadian menonjol 4. Persentase kondusifitas wilayah 5. Jumlah orang asing 6. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat 7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat 8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi 9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik 11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat	365 hari 100 kali 100% 100% 11.000 Org 15% 50 kali 70 orang 26 kali 100 Orang 100%	365 hari 100 kali 100% 100% 11.000 Org 15% 50 kali 70 Orang 26 kali 100 Orang 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 263,15% 100% 100% 104,76% 100% 100% 100% 100% 100%

Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian dan Dinamika Partai Politik, Ormas/LSM dan Lembaga Pemerintah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal	1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan 2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan Dinamis 3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara 4. Jumlah Ormas Aktif 5. Jumlah LSM 6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP	120 Orang 120 Orang 240 Orang 400 390 10 kali	120 Orang 120 Orang 240 Orang 400 390 10 kali	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%
2	Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masy dalam pembangunan bidang Politik	1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik 2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik 3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik 5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya 6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah	250 orang 250 Orang 250 Orang 200 Orang 150 orang 250 orang 35Kab/Kota	250 orang 250 Orang 250 Orang 200 Orang 150 orang 250 orang 35 Kab/Kota	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

	8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng	200 Orang	200 Orang	100%	100%
	9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng	75%	75%	100%	100%
	10. Jumlah orpol	38	38	100%	100%
	11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah	35 kali	35 kali	100%	100%
	12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng	75%	58,46%	77,94%	100%
	13. Persentase Pilkada aman dan demokratis	100%	100%	100%	100%
	14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada	20 kali	20 kali	100%	100%

Tujuan 3 : Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Cinta Tanah Air serta Mewujudkan Pancasila

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara 2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila 3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila 4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila	100 Orang 30 Orang 200 Orang 150 Orang	100 Orang 30 Orang 200 Orang 150 Orang	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela Negara	1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami berbangsa dan bernegara 2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara	200 Orang 200 Orang	200 Orang 200 Orang	100% 100%	100% 100%
3	Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan	1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah 2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa	280 Orang 120 Orang 130 Orang	280 Orang 120 Orang 130 Orang	100% 100% 100%	100% 100% 100%

Tujuan 4 : Mewujudkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib Serta Terlindungi Dari Potensi Konflik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesejahteraan anggota Linmas	1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih 3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha	169 Orang 210 Orang 175 Orang	317Orang 350 Orang 175 Orang	187% 166% 100%	100% 100% 100%
2	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan Lingkungan	1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air 4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas	875 Orang 110 Orang 110 Orang 35 Kab/Kota 360 Orang	875 Orang 110 Orang 110 Orang 35 Kab/Kota 360 Orang	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dan Ratih	1. Jumlah personil yang mengikuti pendidikan Kemasyarakatan	1100 Orang	1100 Orang	100%	100%

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

1. Sasaran – 1

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Data harian situasi daerah	365 hari	365 hari	100%	100%
	2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP	100 kali	100 kali	100%	263,15%
	3. Persentase kejadian menonjol	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase kondusifitas wilayah	100%	100%	100%	100%
	5. Jumlah orang asing	11.000 Orang	11.000 Orang	100%	104,76%
	6. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat	15%	15%	100%	100%
	7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat	50 kali	50 kali	100%	100%
	8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi	70 orang	70 Orang	100%	100%
	9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM	26 kali	26 kali	100%	100%
	10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik	100 Orang	100 Orang	100%	100%
	11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian sasaran 1				100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-1 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-1 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian Sasaran-1, diantaranya adalah:

1. Belum meratanya pemahaman terhadap tupoksi lembaga dari masing-masing pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas, sehingga masih ada hambatan dalam pelaksanaan tugas dengan skala prioritas
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM sehingga masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas serta pemahaman tupoksi pada masing-masing pegawai
3. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas.
4. Dukungan APBD cukup memadai, namun pada kegiatan-kegiatan tertentu hanya mendapatkan porsi anggaran yang kecil

Pencapaian kinerja **sasaran-1** Tahun 2013, pada beberapa kegiatan mengalami penurunan di bandingkan dengan Tahun 2012, disebabkan karena analisis lapangan pada kegiatan Kunjungan VVIP dan Jumlah Orang Asing, sehingga tidak perlu melakukan perubahan anggaran, sedangkan rata-rata **sasaran-1** telah mencapai target sesuai dengan penetapan kinerja di awal tahun.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas PNS sehingga pemahaman terhadap bidang tugas dan tupoksi meningkat
2. Penyusunan tupoksi dan pembagian tugas dengan jelas
3. Penambahan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Untuk ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, strategi yang ditempuh oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas PNS dengan menyelenggarakan dan mengirimkan SDM untuk mengikuti seminar, diklat, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kedinasan.
2. Melakukan sosialisasi tupoksi kepegawaian
3. Melakukan koordinasi dengan bidang atau instansi terkait untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan ketersediaan anggaran

Adapun capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-1 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-1 telah sesuai dengan target yang di tetapkan.

2. Sasaran -2

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal	1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan	120 Orang	120 Orang	100%	100%
	2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan Dinamis	120 Orang	120 Orang	100%	100%
	3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara	240 Orang	240 Orang	100%	100%
	4. Jumlah Ormas Aktif	400	400	100%	100%
	5. Jumlah LSM	390	390	100%	100%
	6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP	10 kali	10 kali	100%	100%
Rata-rata Capaian sasaran 2				100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-2 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-2 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-2 diantaranya adalah :

1. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang heterogen sehingga rentan terhadap terjadinya konflik
2. Krisis ekonomi global turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat sehingga rentan terhadap konflik sosial dan ekonomi
3. Banyak LSM/ormas yang tidak melakukan update data dan kegiatan sehingga terjadi hambatan pada pemantauan
4. Terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran kegiatan
5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas PNS yang menguasai tupoksi

Pencapaian kinerja sasaran-2 pada tahun 2013, telah mencapai sasaran yang ditargetkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan pada elemen masyarakat
2. Peningkatan ketahanan ekonomi dan antisipasi adanya kerawanan ekonomi
3. Peningkatan pemantauan LSM/ormas dalam semua kegiatan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban guna mewujudkan situasi lingkungan yang kondusif

2. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap berbagai kelompok etnis, LSM dan Ormas, melalui komunikasi dan koordinasi untuk pencegahan dini terhadap potensi konflik
3. Melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap semua elemen masyarakat, LSM dan ormas guna menghadapi masalah sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat mampu menjadi benteng pertama terhadap semua potensi konflik.

Adapun capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-2 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-2 telah sesuai dari target yang di tetapkan

3. Sasaran-3

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam pembangunan bidang Politik	1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik	250 orang	250 orang	100%	100%
	2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik	250 Orang	250 Orang	100%	100%
	3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik	250 Orang	250 Orang	100%	100%
	4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik	200 Orang	200 Orang	100%	100%

5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya	150 orang	150 orang	100%	100%
6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik	250 orang	250 orang	100%	100%
7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100%	100%
8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng	200 Orang	200 Orang	100%	100%
9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng	75%	75%	100%	100%
10. Jumlah orpol	38	38	100%	100%
11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah	35 kali	35 kali	100%	100%
12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng	75%	75%	100%	100%
13. Persentase Pilkada aman dan demokratis	100%	100%	100%	100%
14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada	20 kali	20 kali	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-3 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-3 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-3, diantaranya adalah:

1. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang heterogen sehingga rentan terhadap terjadinya konflik.
2. Semakin terkotak-kotaknya pandangan politik masyarakat dengan semakin banyaknya jumlah orpol serta kecenderungan masyarakat untuk tidak peduli dengan politik pemerintahan yang mendorong bertambahnya jumlah golput.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi orpol dalam pembangunan politik masyarakat
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur yang menangani tupoksi tersebut

5. Terbatasnya sarana, prasarana kegiatan

Pencapaian sasaran-3 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan monitoring pembangunan politik masyarakat
2. Penyatuan persepsi orpol, ormas/LSM dalam pembangunan politik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan politik masyarakat.
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan orpol, ormas/LSM untuk mewujudkan situasi dan kondisi politik yang dinamis, beretika dan berbudaya serta demokratis
4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pembangunan politik masyarakat
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan anggaran guna kelancaran program dan kegiatan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan, pembinaan dan monitoring pembangunan politik masyarakat melalui seminar, FGD dan pengarahan pendidikan politik kepada elemen masyarakat dan aparatur pemerintahan yang menangani
2. Melaksanakan kegiatan pengarahan dan pembinaan untuk orpol, LSM/ormas, dan elemen masyarakat guna menciptakan kondisi kehidupan politik yang sejuk, demokratis, dinamis dan beretika.
3. Melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintahan sehingga mampu menjadi penggerak kehidupan politik masyarakat serta mampu melaksanakan Pilkada dengan baik.

4. Melaksanakan komunikasi dan pendekatan kepada orpol, LSM/ormas untuk menciptakan kondisi kehidupan politik masyarakat yang beretika, berbudaya dan demokratis.

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-3 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-3 telah sesuai dari target yang di tetapkan

4. Sasaran-4

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara	100 Orang	100 Orang	100%	100%
	2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila	30 Orang	30 Orang	100%	100%
	3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila	200 Orang	200 Orang	100%	100%
	4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila	150 Orang	150 Orang	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 4				100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-4 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-4 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-4, diantaranya adalah :

1. Krisis global yang membuat kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, sehingga banyak dari elemen masyarakat yang berkonsentrasi pada sektor ekonomi dan tidak lagi mempedulikan ideologi bangsa

2. Pandangan sebagian masyarakat bahwa ideologi negara tidak lagi aktual untuk memecahkan persoalan bangsa
3. Kemajuan pembangunan bidang politik yang mendorong semakin banyaknya jumlah partai politik dan LSM/ormas, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas yang memadai akan semakin terkotak-kotak dengan kepentingan tertentu
4. Tidak adanya kurikulum khusus ideologi negara pada berbagai jenjang pendidikan
5. Terbatasnya jumlah pendidik dan aparatur pemerintahan yang mampu memberikan pemahaman ideologi negara

Pencapaian sasaran-4 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ideologi negara
2. Penguatan ketahanan masyarakat di segala bidang
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan kalangan pendidik

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila
2. Melaksanakan peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan dan kalangan pendidik
3. Melakukan penguatan kondisi ketahanan masyarakat guna menangkal potensi konflik horizontal

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-4 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-4 telah sesuai dari target yang di tetapkan

5. Sasaran-5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara	1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami berbangsa dan bernegara	200 Orang	200 Orang	100%	100%
	2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara	200 Orang	200 Orang	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 5				100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-5 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-5 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-5, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan kondisi sosial masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan golongan
2. Turunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara
3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pencapaian sasaran-5 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan
2. Mengembalikan masyarakat ke jatidiri bangsa Indonesia yang bersifat kebersamaan, gotong royong dan musyawarah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melakukan pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan budaya Indonesia dan bela negara.

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-5 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-5 telah sesuai dari target yang di tetapkan

6. Sasaran-6

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan	1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah	280 Orang	280 Orang	100%	100%
	2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan	120 Orang	120 Orang	100%	100%
	3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa	130 Orang	130 Orang	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 6				100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-6 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-6 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-6, diantaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara masyarakat
2. Rendahnya minat masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan seni serta budaya daerah
3. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang heterogen serta adanya krisis ekonomi yang menyebabkan rawan terjadi konflik sosial dan keagamaan
4. Semakin terkikisnya jatidiri masyarakat Indonesia yang mengepankan kebersamaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Pencapaian sasaran-6 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan serta rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sehingga mendorong kesadaran bela negara
2. Meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran untuk melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya daerah di kalangan pemuda dan pelajar
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jatidiri karakteristik dan bangsa.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan memberikan pemahaman nasionalisme dan bela negara

2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran melestarikan seni dan budaya daerah
3. Melaksanakan pembinaan karakter dan jatidiri bangsa untuk pemuda dan pelajar

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-6 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-6 telah sesuai dari target yang di tetapkan

7. Sasaran-7

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesejahteraan anggota Linmas	1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka	169Orang	317Orang	187%	100%
	2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih	210 Orang	350 Orang	166%	100%
	3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha	175 Orang	175 Orang	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 7				151%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-7 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-7 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat dua indikator kinerja yang melebihi target, disebabkan karena usulan Kab/Kota.

Hambatan atau kendala dalam upaya pencapaian sasaran-7, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah PNS yang menangani tupoksi tersebut

2. Terbatasnya jumlah anggaran APBD sehingga tidak semua anggota Hansip/Linmas yang mendapatkan bantuan
3. Keterlambatan pelaporan dan update data Hansip/Linmas yang membutuhkan bantuan

Pencapaian sasaran-7 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan jumlah anggaran dan ketepatan update data Hansip/Linmas
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang menangani
3. Peningkatan pembinaan Hansip/Linmas

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring dan validisasi data Hansip/Linmas terjadwal secara periodik
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur yang menangani tupoksi Hansip/Linmas

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-6 telah mencapai **151%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-6 telah melebihi dari target yang di tetapkan

8. Sasaran-8

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan Lingkungan	1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan	875 Orang	875 Orang	100%	100%
	2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil	110 Orang	110 Orang	100%	100%
	3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air	110 Orang	110 Orang	100%	100%
	4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100%	100%
	5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas	360 Orang	360 Orang	100%	100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-8 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-8 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-8, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya regenerasi Hansip/Linmas, di sebabkan pemuda kurang menaruh minat pada Hansip/Linmas.
2. Terbatasnya kualitas anggota Hansip/Linmas dalam pengamanan lingkungan
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan

Pencapaian sasaran-8 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Hansip/Linmas
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan yang menangani
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan untuk peningkatan anggaran dan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
4. Meningkatkan pembinaan Menwa Mahadipa guna menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan Hansip/Linmas dalam pengamanan lingkungan
2. Melaksanakan pendidikan TOT untuk peningkatan kapasitas aparatur yang menangani Hansip/Linmas
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Menwa Mahadipa

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-8 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-8 telah sesuai dari target yang di tetapkan

9. Sasaran-9

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dan Ratih	1. Jumlah personil yang mengikuti pendidikan Kemasyarakatan	1100 Orang	1100 Orang	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 9				100%	

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-8 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-8 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-9, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Hansip/Linmas kab/kota sehingga berpengaruh pada sedikitnya jumlah peserta yang mengikuti pendidikan kemsyarakatan Hansip/Linmas
2. Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

Pencapaian sasaran-8 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah anggota Hansip/Linmas dari masing-masing kab/kota
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan jumlah anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan kaderisasi Hansip/Linmas, sehingga anggota Hansip/Linmas diisi oleh masyarakat dalam usia produktif
2. Melaksanakan kegiatan di seluruh kab/kota di Jawa Tengah

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-8 telah mencapai **100%**, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-8 telah sesuai dari target yang di tetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2013 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. **Rp. 61.383.130.000 (enam puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga seratus tiga puluh ribu rupiah)**. Anggaran tersebut di jabarkan sebagai berikut :

3. **Belanja Langsung**, sebesar Rp. 50.712.389.000 (lima puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
4. **Belanja Tidak Langsung**, sebesar Rp. 10.671.337.000 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Anggaran tersebut untuk melaksanakan 12 program dan 97 kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2013**

No	Kode Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Jumlah anggaran (Rp.)	Target (%)	Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi Keuangan (spj)				Real. fisik		Permasalahan dan upaya pemecahannya	Keterangan
							s/d bulan lalu (Rp.)	Bulan ini (Rp.)	s/d Bulan ini		s/d bulan ini			
									(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PENDIDIKAN												
		PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL												
1	1.01.1.19.01.18.01	Pendidikan Kemasyarakatan	Endah Yulastuti	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	1.611.603.000	318.093.000	1.929.696.000	96,48	2.000.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI												
		PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN												
2	1.19.1.19.01.15.05	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas	Sri Dyah Wahyuningsih	1.400.000.000	100,00	1.400.000.000	1.117.840.000	172.850.000	1.290.690.000	92,19	1.400.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
3	1.19.1.19.01.15.06	KOMINDA	Sri Dyah Wahyuningsih	300.000.000	100,00	300.000.000	241.775.000	34.930.000	276.705.000	92,24	300.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
4	1.19.1.19.01.15.07	FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan	Nugroho BS	300.000.000	100,00	300.000.000	279.880.000	0	279.880.000	93,29	300.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
5	1.19.1.19.01.15.08	Pengawasan Orang Asing	Sri Dyah Wahyuningsih	200.000.000	100,00	200.000.000	172.065.000	9.940.000	182.005.000	91,00	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
6	1.19.1.19.01.15.09	Koordinasi Pengamanan Wilayah	Nugroho BS	350.000.000	100,00	350.000.000	305.130.000	0	305.130.000	87,18	350.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
7	1.19.1.19.01.15.10	Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa tengah	Nugroho BS	150.000.000	100,00	150.000.000	97.145.000	46.275.000	143.420.000	95,61	150.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
8	1.19.1.19.01.15.11	Pembinaan Sosial Politik	Nugroho BS	540.000.000	100,00	540.000.000	499.170.000	0	499.170.000	92,44	540.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
9	1.19.1.19.01.15.12	Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian	Sri Supami	514.000.000	100,00	514.000.000	477.973.000	35.538.000	513.511.000	99,90	514.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
10	1.19.1.19.01.15.13	Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah	Nugroho BS	300.000.000	100,00	300.000.000	220.250.000	0	220.250.000	73,42	300.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
11	1.19.1.19.01.15.15	Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan	Nugroho BS	300.000.000	100,00	300.000.000	40.545.000	175.650.000	216.195.000	72,07	300.000.000	100,00	Luasnya Lokasi di Jawa Tengah, sehingga belum mencapai hingga di semua daerah perbatasan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	1.19.1.19.01.15.19	Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik	Nugroho BS	200.000.000	100,00	200.000.000	93.910.000	62.325.000	156.235.000	78,12	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
13	1.19.1.19.01.15.20	Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi	Nugroho BS	390.000.000	100,00	390.000.000	389.488.400	0	389.488.400	99,87	390.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
14	1.19.1.19.01.15.21	Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Rakyat	Sri Supami	200.000.000	100,00	200.000.000	194.554.000	4.796.000	199.350.000	99,68	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
15	1.19.1.19.01.15.22	Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan	Nugroho BS	200.000.000	100,00	200.000.000	183.560.000	0	183.560.000	91,78	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
16	1.19.1.19.01.15.23	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	Sri Dyah Wahyuningsih	150.000.000	100,00	150.000.000	118.480.000	0	118.480.000	78,99	150.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
17	1.19.1.19.01.15.25	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal	Sri Supami	150.000.000	100,00	150.000.000	147.450.000	2.550.000	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00		
18	1.19.1.19.01.15.26	Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan	Nugroho BS	200.000.000	100,00	200.000.000	171.570.000	0	171.570.000	85,79	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
19	1.19.1.19.01.15.28	Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	Sri Dyah Wahyuningsih	200.000.000	100,00	200.000.000	199.949.200	0	199.949.200	99,97	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
20	1.19.1.19.01.15.29	Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)	Sri Dyah Wahyuningsih	200.000.000	100,00	200.000.000	52.337.000	147.080.000	199.417.000	99,71	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
		PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN												
21	1.19.1.19.01.17.01	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Sri Dyah Wahyuningsih	400.000.000	100,00	400.000.000	299.150.000	100.450.000	399.600.000	99,90	400.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
22	1.19.1.19.01.17.02	Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara	Sri Dyah Wahyuningsih	275.000.000	100,00	275.000.000	273.455.000	0	273.455.000	99,44	275.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
23	1.19.1.19.01.17.03	Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain	Sri Dyah Wahyuningsih	300.000.000	100,00	300.000.000	268.691.000	26.848.000	295.539.000	98,51	300.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
24	1.19.1.19.01.17.04	Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang	Sri Dyah Wahyuningsih	250.000.000	100,00	250.000.000	247.992.000	0	247.992.000	99,20	250.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
25	1.19.1.19.01.17.05	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah	Sri Supami	275.000.000	100,00	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00		
26	1.19.1.19.01.17.06	Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan	Sri Supami	250.000.000	100,00	250.000.000	234.200.000	15.800.000	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00		
27	1.19.1.19.01.17.07	Pemeliharaan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya	Sri Supami	250.000.000	100,00	250.000.000	247.091.000	2.909.000	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
28	1.19.1.19.01.17.14	Fasilitasi Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik	Sri Dyah Wahyuningsih	250.000.000	100,00	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	1.19.1.19.10.17.09	Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	Sri Dyah Wahyuningsih	250.000.000	100,00	250.000.000	244.500.000	5.500.000	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00		
		KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN												
30	1.19.1.19.01.18.01	Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah	Nugroho BS	150.000.000	100,00	150.000.000	111.949.000	150.000	112.099.000	74,73	150.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
31	1.19.1.19.01.18.02	Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat	Sri Suparni	250.000.000	100,00	250.000.000	249.500.000	0	249.500.000	99,80	250.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
32	1.19.1.19.01.18.04	Pendayagunaan Potensi Ormas	Sri Suparni	350.000.000	100,00	350.000.000	286.621.750	63.378.250	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		
33	1.19.1.19.01.18.05	Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara	Sri Suparni	200.000.000	100,00	200.000.000	194.128.000	5.272.000	199.400.000	99,70	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
34	1.19.1.19.01.18.07	Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar	Sri Dyah Wahyuningsih	125.000.000	100,00	125.000.000	104.000.000	0	104.000.000	83,20	125.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN												
35	1.19.1.19.01.19.04	Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2006)	Sri Dyah Wahyuningsih	300.000.000	100,00	300.000.000	259.935.000	23.600.000	283.535.000	94,51	300.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
36	1.19.1.19.01.19.05	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	Sri Dyah Wahyuningsih	250.000.000	100,00	250.000.000	183.748.500	59.995.000	243.743.500	97,50	250.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
37	1.19.1.19.01.19.10	Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	Sri Dyah Wahyuningsih	3.095.000.000	100,00	3.095.000.000	3.042.514.000	45.986.000	3.088.500.000	99,79	3.095.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
		PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT												
38	1.19.1.19.01.21.01	Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga	Nur Chasanah	450.000.000	100,00	450.000.000	369.410.000	22.590.000	392.000.000	87,11	450.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
39	1.19.1.19.01.21.02	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah	Nur Chasanah	450.000.000	100,00	450.000.000	247.993.000	181.235.500	429.228.500	95,38	450.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
40	1.19.1.19.01.21.03	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol	Nur Chasanah	464.000.000	100,00	464.000.000	306.372.000	89.713.000	396.085.000	85,36	464.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
41	1.19.1.19.01.21.05	Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	Nur Chasanah	200.000.000	100,00	200.000.000	179.550.000	0	179.550.000	89,78	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost	
42	1.19.1.19.01.21.06	Penguatan Sistem dan Implementasi PILKADA	Nur Chasanah	150.000.000	100,00	150.000.000	134.820.000	0	134.820.000	89,88	150.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
43	1.19.1.19.01.21.07	FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat	Nur Chasanah	200.000.000	100,00	200.000.000	151.055.500	30.310.500	181.366.000	90,68	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
44	1.19.1.19.01.21.09	Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah	Nur Chasanah	150.000.000	100,00	150.000.000	109.100.000	40.600.000	149.700.000	99,80	150.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
45	1.19.1.19.01.21.11	Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat	Nur Chasanah	350.000.000	100,00	350.000.000	191.935.000	151.633.200	343.568.200	98,16	350.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
46	1.19.1.19.01.21.12	Peningkatan Komunikasi Politik Masyarakat	Nur Chasanah	150.000.000	100,00	150.000.000	126.050.000	0	126.050.000	84,03	150.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	1.19.1.19.01.21.13		Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Nur Chasanah	100.000.000	100,00	100.000.000	94.160.000	0	94.160.000	94,16	100.000.000	100,00	Efisiensi anggaran
48	1.19.1.19.01.2108		Peningkatan Penanganan Dampak Politik PILKADA	Nur Chasanah	125.000.000	100,00	125.000.000	118.559.000	0	118.559.000	94,85	125.000.000	100,00	Efisiensi anggaran
			PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH)											
49	1.19.1.19.01.22.05		Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jawa Tengah	Endah Yuliasuti	1.475.000.000	100,00	1.475.000.000	1.074.400.000	396.155.000	1.470.555.000	99,70	1.475.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
50	1.19.1.19.01.22.06		Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jawa Tengah	Endah Yuliasuti	300.000.000	100,00	300.000.000	290.680.500	0	290.680.500	96,89	300.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
51	1.19.1.19.01.22.07		Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan Bagi Komandan Satlinmas	Endah Yuliasuti	200.000.000	100,00	200.000.000	177.141.000	15.000.000	192.141.000	96,07	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
52	1.19.1.19.01.22.08		Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di Air	Endah Yuliasuti	200.000.000	100,00	200.000.000	189.055.000	6.800.000	195.855.000	97,93	200.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
53	1.19.1.19.01.22.16		Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas	Endah Yuliasuti	150.000.000	100,00	150.000.000	138.674.800	10.360.000	149.034.800	99,36	150.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
54	1.19.1.19.01.22.20		Fasilitasi Kegiatan Menwa Mahadipa	Endah Yuliasuti	80.000.000	100,00	80.000.000	44.548.000	26.402.000	70.950.000	88,69	80.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost
55	1.19.1.19.01.22.21		Pembinaan dan Pendampingan Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jawa Tengah	Endah Yuliasuti	414.120.000	100,00	414.120.000	409.874.000	2.898.000	412.772.000	99,67	414.120.000	100,00	Efisiensi anggaran
56	1.19.1.19.01.22.22		Dukungan Fasilitasi Pam Pilgub 2013	Endah Yuliasuti	1.626.640.000	100,00	1.626.640.000	1.484.045.000	3.140.000	1.487.185.000	91,43	1.626.640.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
57	1.19.1.19.01.22.23		Orientasi Kesiapan dan Dukungan Fasilitasi Pam Pilgub Tahun 2013 Bagi Satlinmas	Endah Yuliasuti	23.071.520.000	100,00	23.071.520.000	12.267.530.500	0	12.267.530.500	53,17	23.071.520.000	100,00	Anggaran yang digunakan hanya untuk 1 putaran Pilgub.
58	1.19.1.19.01.22.24		Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa	Endah Yuliasuti	125.000.000	100,00	125.000.000	101.525.000	23.200.000	124.725.000	99,78	125.000.000	100,00	Efisiensi anggaran
			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN											
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM											
59	1.20.1.19.01.16.36		Sinkronisasi Kesbang Pol dan Linmas	Nugroho BS	200.000.000	100,00	200.000.000	182.560.000	15.634.000	198.194.000	99,10	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran
			PENDUKUNG PROGRAM											
			PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
60	1.19.1.19.01.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nugroho BS	6.760.000	100,00	6.760.000	6.220.000	540.000	6.760.000	100,00	6.760.000	100,00	
61	1.19.1.19.01.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nugroho BS	546.000.000	100,00	546.000.000	389.381.427	39.437.779	428.819.206	78,54	546.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
62	1.19.1.19.01.01.05		Jaminan Barang Milik Daerah	Nugroho BS	70.000.000	100,00	70.000.000	69.941.900	0	69.941.900	99,92	70.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah premi asuransi
63	1.19.1.19.01.01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nugroho BS	216.957.000	100,00	216.957.000	172.868.700	21.915.400	194.784.100	89,78	216.957.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
64	1.19.1.19.01.01.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nugroho BS	102.100.000	100,00	102.100.000	78.958.000	16.085.000	95.043.000	93,09	102.100.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
65	1.19.1.19.01.01.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nugroho BS	5.000.000	100,00	5.000.000	4.396.000	600.000	4.996.000	99,92	5.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
66	1.19.1.19.01.01.14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nugroho BS	35.385.000	100,00	35.385.000	27.895.000	6.628.750	34.523.750	97,57	35.385.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
67	1.19.1.19.01.01.15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nugroho BS	29.000.000	100,00	29.000.000	19.195.000	8.335.000	27.530.000	94,93	29.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
68	1.19.1.19.01.01.17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Nugroho BS	82.000.000	100,00	82.000.000	56.678.450	5.905.000	62.583.450	76,32	82.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
69	1.19.1.19.01.01.18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Luar Daerah	Nugroho BS	575.000.000	100,00	575.000.000	273.037.820	125.171.360	398.209.180	69,25	575.000.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
70	1.19.1.19.01.01.19		Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Nugroho BS	659.210.000	100,00	659.210.000	520.710.000	96.745.000	617.455.000	93,67	659.210.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
71	1.19.1.19.01.01.02.05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Nugroho BS	188.110.000	100,00	188.110.000	0	186.570.000	186.570.000	99,18	188.110.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan harga kendaraan	
72	1.19.1.19.01.02.22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nugroho BS	518.025.000	100,00	518.025.000	405.873.400	112.111.000	517.984.400	99,99	518.025.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
73	1.19.1.19.01.02.24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Nugroho BS	714.798.000	100,00	714.798.000	556.170.250	106.623.000	662.793.250	92,72	714.798.000	100,00	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
74	1.19.1.19.01.02.29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Nugroho BS	25.000.000	100,00	25.000.000	18.300.000	6.700.000	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00		
75	1.19.1.19.01.02.30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Nugroho BS	200.000.000	100,00	200.000.000	88.206.052	111.241.153	199.447.205	99,72	200.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
76	1.19.1.19.01.02.40		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi	Nugroho BS	25.000.000	100,00	25.000.000	13.430.000	11.570.000	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00		
77	1.19.1.19.01.02.41		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Nugroho BS	150.000.000	100,00	150.000.000	127.575.000	18.750.000	146.325.000	97,55	150.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
			PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR												
78	1.19.1.19.01.03.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nugroho BS	100.000.000	100,00	100.000.000	92.107.400	0	92.107.400	92,11	100.000.000	100,00	Penggunaan anggaran menyesuaikan jumlah pegawai	
			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												
79	1.19.1.19.01.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Nugroho BS	44.400.000	100,00	44.400.000	34.800.000	1.500.000	36.300.000	81,76	44.400.000	100,00	Penggunaan Anggaran sesuai permintaan diklat	
80	1.19.1.19.01.05.02		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Nugroho BS	142.364.000	100,00	142.364.000	139.124.000	0	139.124.000	97,72	142.364.000	100,00	Efisiensi anggaran	
81	1.19.1.19.01.05.08		Pembinaan Bidang Kepegawaian PNS	Nugroho BS	182.000.000	100,00	182.000.000	109.850.000	65.000.000	174.850.000	96,07	182.000.000	100,00	Efisiensi anggaran	
			JUMLAH		50.712.389.000	100,00	50.712.389.000	35.006.616.549	3.291.304.892	38.297.921.441	75,52	50.712.389.000	100,00		

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa **realisasi anggaran belanja langsung** Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah terserap **75,52%** atau **Rp. 38.297.921.441**, hal ini di sebabkan karena efisiensi anggaran pada kegiatan PAM Pilgub 2013. Pada tabel diatas dapat pula dilihat bahwa **capaian realisasi fisik** sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 telah mencapai **100%**, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinisi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah dan telah tuntas dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Keberadaan SKPD di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di Jawa Tengah. Mengingat tupoksi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yang sangat strategis maka di perlukan pengelolaan SDM, anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan berhasil di capai dengan Kategori **Amat Baik**. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), dicapai dengan persentase 105,6% dengan rincian:
 1. Sasaran pertama 100%
 2. Sasaran kedua 100%
 3. Sasaran ketiga 100%
 4. Sasaran keempat 100%
 5. Sasaran kelima 100%

 6. Sasaran keenam 100%
 7. Sasaran ketujuh 151%
 8. Sasaran kedelapan 100%
 9. Sasaran kesembilan 100%
- b. Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyerap 75,52% dari total anggaran yang telah ditetapkan dengan capaian fisik mencapai 100%, sehingga Badan Kesbang Pol dan Linmas berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan tetap mempertahankan serta menaikkan kinerja untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi.

B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan diantaranya :

1. Kendala Internal.

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional dibidangnya sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Masih rendahnya pemahaman Tupoksi dari pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas.
- c. Terbatasnya dukungan APBD untuk mendukung Tupoksi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Terbatasnya operasional kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Masih adanya tumpang tindih/overlapping dalam pelaksanaan tugas.

2. Kendala Eksternal.

- a. Kondisi Jawa Tengah dengan karakteristik dan letak geografis serta masyarakatnya yang heterogen sangat rentan terhadap terjadinya konflik-konflik yang bersifat multikompleks dan multidimensi.
- b. Kegiatan dari kelompok radikal yang semakin berkembang dengan pesat, aksi terorisme, kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintah dan lemahnya kondisi kamtibmas yang berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok/golongan, kriminalitas, dan diskriminasi.
- c. Demokratisasi kehidupan politik yang semakin meningkat, dan belum adanya kedewasaan politik masyarakat serta sebagian dari elit politik dalam berpoltik yang beretika dan berbudaya yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik bagi elit politik dan konflik sosial masyarakat dengan terjadinya benturan-benturan antar elit politik, saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain.
- d. Lemahnya ketahanan bangsa, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan pembauran bangsa, lemahnya daya tangkal terhadap penetasi masuknya budaya asing, rendahnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
- e. Dampak krisis global yang berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan perekonomian di daerah, menurunnya daya beli masyarakat dan kesenjangan sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal dan konflik-konflik lainnya.

C. Strategi Pemecahan Masalah

1. Strategi Pemecahan Internal.

- a. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan keterampilan SDM Aparatur Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan mengirimkan ke diklat, kursus, pelatihan, pendidikan S1/S2.
- b. Meminta kepada atasan masing-masing untuk secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada pegawai mengenai Tupoksi agar lebih memahami terhadap tupoksi masing-masing
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan BEPPEDA Provinsi Jawa Tengah agar meningkatkan anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung Tupoksi Bidang Kesbang Pol dan Linmas.
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penambahan kendaraan dinas operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan Tupoksi masing-masing agar tidak terjadi overlapping dalam kewenangan tugas.

2. Strategi Pemecahan Eksternal.

- a. Kondisi Jawa Tengah dengan karakteristik dan letak geografis serta masyarakatnya yang heterogran sangat rentan terhadap terjadinya konflik-konflik yang bersifat multikompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya-upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketenteraman masyarakat yang kondusif.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok radikal sebagai langkah antisipasi dan koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh agama/masyarakat untuk mencegah berkembangnya kelompok radikal dan aksi terorisme di Jawa Tengah, pasyarakatatan upaya penyelenggaraan pertahanan negara dan

perlindungan masyarakat serta penegakan hak dan kewajiban warganegara secara adil dan merata.

- c. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan politik dengan melalui komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder (Partai Politik, Ormas.LSM) untuk mewujudkan situasi dan kondisi sosial politik yang dinamis dan demokratis guna terciptanya kondusifitas daerah.
- d. Peningkatan ketahanan bangsa, pembauran bangsa, Ideologi Pancasila, kewaspadaan nasional dan pengkajian masalah-masalah strategis daerah serta perlindungan masyarakat dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis, persatuan dan kesatuan bangsa..
- e. Melakukan langkah koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait guna mengatasi dampak krisis global yang berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, Maret 2014
**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFA'I, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591202 198203 1 005